

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu dinas Daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah, sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas, Pembangunan bidang Perhubungan ditetapkan dalam misi Pemerintah Kabupaten yaitu pada misi ke-6 sebagai berikut *“Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonom, social dan budaya melalui gerakan masyarakat yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai”*:

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi tersebut, Dinas Perhubungan menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu : " Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, yaitu :

1. Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran;
2. Terwujudnya sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas

Guna mencapai tujuan dan prioritas sasaran tersebut pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 3 (Tiga) program utama dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan yang didukung anggaran sebesar Rp.. Rp. 50.477.449.000,- (Lima Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah), terdiri dari :

- 1) **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp. 3.515.247.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.385.121.301,- terdapat selisih sebesar Rp. 130.125.699,- terdiri dari Gaji pegawai sebesar Rp. 86.428.243,- Tambahan Penghasilan pegawai sebesar Rp. 39.459.500,- dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.237.956,-
- 2) **Belanja Langsung** sebesar Rp. 46.962.202.000,- dengan realisasi sebesar Rp.45.087.628.688,- atau sebesar 96,01%, terdapat selisih dan atau efisiensi sebesar Rp.1.874.743.312,-

Untuk tingkat capaian **sasaran-1** : yaitu terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran, menunjukkan bahwa Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan menunjukkan skala **baik**, hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja yang dapat dicapai yaitu sebesar **90,34%**.

Untuk tingkat capaian **sasaran-2** adalah sebesar 93,6%, jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 113% dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran 2017 terjadi penurunan akan tetapi masuk dalam kategori **“baik”** Secara Umum pada tahun 2017 Dinas Perhubungan dapat melaksanakan 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,34% atau masuk kategori **” berhasil.”**

Meskipun tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran masuk dalam kategori **“baik”** atau rata-rata 91,34%, namun dalam pelaksanaan masih menemui beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pengusaha atau pemilik angkutan untuk memperbaharui kendaraan dan tidak memperpanjang ijin trayek, sehingga banyak angkutan yang mangkrak/tidak beroperasi;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL, LPJU dan tehnik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL dan LPJU
2. Membuat evaluasi standar operasional pelayanan perijinan trayek dan pengujian kendaraan bermotor dan Bersurat kepada para pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melakukan perpanjangan ijin trayek atau memperbaharui ijin trayek

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah provinsi/kab./kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Semakin kritisnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang lebih realistis, mendorong pemerintah untuk meninjau kembali sistem pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang lebih *accountable*, hal ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Hal tersebut di atas sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Dengan demikian jelas bahwa rakyat mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* yang menitikberatkan pada asas-asas demokrasi, transparansi dan partisipasi dalam setiap pelaksanaannya. Aspek-aspek ini merupakan prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan.

Oleh karena itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem ini dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai

tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada publik secara transparan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun anggaran 2017.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2017 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Penjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjIP

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 Dinas Perhubungan adalah :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2016 – 2021;
2. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang, khususnya dalam perencanaan kerja di tahun mendatang;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada Publik atas penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun anggaran 2017.

D. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Kedudukan Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kemudian dalam pasal 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 89 tahun 2016 disebutkan tugas Dinas Perhubungan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan {LLAJ}

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

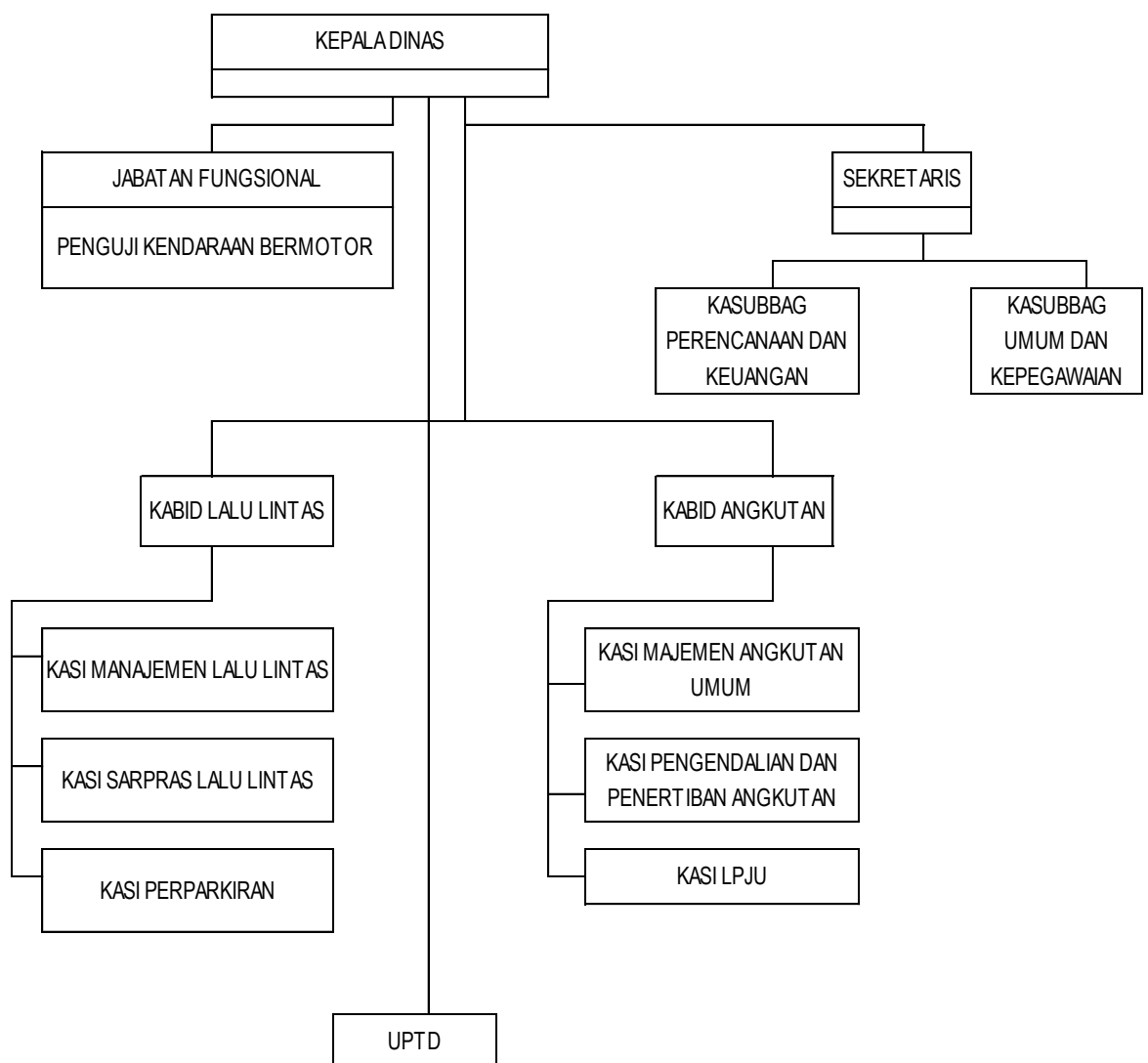
1. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

E. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2) Subbagian. Umum dan Kepegawaian
- c. Kepala Bidang Lalu Lintas
 - 1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
 - 3) Seksi Manajemen Parkir
- d. Kepala Bidang Angkutan
- 1) Seksi Manajemen Angkutan Umum
 - 2) Seksi Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3) Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Gambar 1
Struktur Organisasi DINAS PERHUBUNGAN



e. Kondisi Kepegawaian

Dinas Perhubungan sebagai dinas teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia yang

mempunyai dedikasi dan inovasi yang tinggi, serta memiliki kemampuan teknis di bidang Perhubungan, jumlah pegawai Dinas Perhubungan sampai dengan Desember 2017 terinci sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai	: 90 (sembilan puluh) orang
Pegawai Negara Sipil	: 46 (empat puluh enam) orang
PTT SK. Bupati	: 13 (tiga belas) orang
PTT SK. Kepala Dinas	: 31 (tiga puluh satu) orang

b. PNS Berdasarkan Pendidikan

S2	: 2 (dua) orang
S1	: 12 (dua belas) orang
Diploma III	: 5 (lima) orang
Diploma II	: 4 (empat) orang
SLTA	: 16 (enam belas) orang
SLTP	: 4 (empat) orang
SD	: 3 (tiga) orang
J u m l a h	: 46 (empat puluh enam) orang

c. PNS Berdasarkan Golongan

Golongan IV	: 3 (tiga) orang
Golongan III	: 17 (tujuh belas) orang
Golongan II	: 24 (dua puluh empat) orang
Golongan I	: 2 (dua) <u>orang</u>
J u m l a h	: 46 (empat puluh enam) orang

d. PNS Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki	: 39 (tiga puluh sembilan) orang
Perempuan	: 7 (tujuh) orang
Jumlah	: 46 (empat puluh enam) orang

e. Pembagian Pesonil

NO.	BIDANG/UNIT	PNS/CPNS	NON PNS (PTT)
1	Kepala Dinas	1	
1	SEKRETARIAT	10	10
2	BIDANG ANGKUTAN		
	a. INDUK (KANTOR)	5	1
	b. PENGUJIAN KEND. BERMOTOR	7	2
	c. TERMINAL BUKATEJA*)	2	4
	d. TERMINAL KEJOBONG*)	1	1
	e. TERMINAL KUTASARI	0	4
	f. TERMINAL KUTABAWA*)	0	2
	TERMINAL JOMPO	0	2
	TERMINAL PENARUBAN	0	1
	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	12	13
3	BIDANG LALU LINTAS	8	4
	JUMLAH	46	44

Lebih lengkap mengenai kondisi kepegawaian Dinas Perhubungan diuraikan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sebagaimana terlampir.

f. Sarana dan Prasarana :

a. Prasarana Gedung pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

- 1) Gedung Kantor Dinas dan sekretariat PPID
- 2) Gedung Terminal Purbalingga
- 3) Gedung Terminal Bobotsari
- 4) Gedung Terminal Bukateja
- 5) Gedung Terminal Kejobong
- 6) Gedung Terminal Kutabawa

- 7) Gedung Sub Terminal Penaruban
- 8) Gedung Sub Terminal Jompo
- 9) Gedung Terminal Kutasari
- 10) Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Sarana Operasional

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1) Kendaraan Roda empat | : 9 (sembilan) unit |
| 2) Kendaraan Roda dua | : 18 (delapan belas) unit |
| 3) Sarana Komputer / Printer | : 26 (dua puluh enam) unit |
| 4) Laptop | : 8 (delapan) unit |
| 5) Pesawat Telepon | : 3 (tiga) unit |
| 6) Pesawat HT | : 32 (tiga puluh dua) unit |
| 7) Repeater | : 1 (satu) paket |
| 8) Peralatan PKB | : 1 (satu) paket |
| 9) Peralatan Perbengkelan | : 1 (satu) paket |
| 10) Truk Sandelift LPJU | : 1 unit |
| 11) Truk Skylift | : 1 unit |

Secara keseluruhan asset yang dikelola Dinhub terdiri dari KIB A – E senilai Rp.85.134.768.374,- (Delapan puluh lima milyar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah)

g. Kondisi Ekonomi

Percepatan pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya pembangunan sarana perhubungan, komunikasi dan informatika dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah. Melalui penguatan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke wilayah-wilayah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen) dan masyarakat (konsumen). Adapun fasilitas Dinas Perhubungan yang mendukung kegiatan ekonomi, yaitu :

1) **Fasilitas Angkutan :**

- a. Panjang jalan di wilayah Kabupaten Purbalingga mencapai 784,233 Km yang terdiri dari jalan beraspal sepanjang 784.139 Km, kerikil sepanjang 42 Km dan jalan tanah sepanjang 52 Km.
- b. Kendaraan niaga yang ada di Kabupaten Purbalingga sebanyak 858 kendaraan, terdiri dari 42 unit kendaraan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 101 kendaraan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), 211 unit angkutan Kota, 491 unit angkutan perdesaan, 13 unit angkutan Pariwisata dan 30 unit angkutan Taxi.
- c. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan transportasi di kabupaten purbalingga terdapat 1 Terminal type A yang berada di Bobotsari, 1 terminal type B yaitu Terminal Purbalingga, serta 4 buah terminal type C yaitu Terminal Bukateja, Kejobong, Kutasari dan Kutabawa, dan 2 (dua) sub terminal yaitu sub terminal Penaruban dan sub terminal Jompo.

2) **Fasilitas Lalu Lintas :**

NO	FASILITAS Perlengkapan Jalan	JUMLAH	
		JALAN PROVINSI	JALAN KABUPATEN
1.	Marka Jalan	78,5 km	202,872km
2.	Rambu-rambu	515 bh	773 bh
3.	RPPJ	71 bh	100 bh
4.	Deliniator	105 bh	146 bh
5.	Safety Mirror	10 bh	265bh
6.	Guard Raill	1052 m	2984 m
7.	Traffic Light	14 unit	12 unit
8.	Warning Light	22 unit	33 unit
9	Road Barrier	5 buah	125 buah

10	Traffic cone	100 buah	95 buah
11	Halte	8	1
12	Paku marka	460 buah	
13	Lampu PJU	buah	5629 buah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perhubungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021 .

Untuk mewujudkan Renstra tersebut ditetapkan Visi dan Misi yang rasional sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga yaitu :

A.1. Visi

Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Dinas daerah yang merupakan satu kesatuan sistem pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk terwujudnya visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga, telah ditetapkan visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :**“Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlak mulia”**

A.2. M I S I :

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah juga disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu pelaku

pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, yaitu pada misi ke 6 : ” *Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai*”

A.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-6 terkait dengan Dinas Perhubungan adalah “ Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “:

A.4. Kebijakan

Arah dari kebijakan urusan Perhubungan ini dimaksudkan untuk mendukung aktifitas sektor lain khususnya dibidang pendidikan dan perekonomian rakyat yang semakin meningkat sehingga meningkat pula partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, arah kebijakan tersebut yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan perlengkapan jalan serta pelayanan perparkiran;
- 2) Mendukung reaktifasi jalur kereta api, pengadaan transportasi massal (BRT), .pembukaan akses transportasi udara.

A.5. Prioritas Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan memprioritaskan pembangunan yang diwujudkan dalam Program – program kegiatan yang terdiri 3 (tiga) Program sebagai berikut :

1. Program penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas
3. Program Peningkatan pelayanan Angkutan

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- d. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- e. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
- f. Pendidikan dan pelatihan pegawai
- g. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- a. Pengelolaan Kebersihan Terminal
- b. Operasi Tehnis Laik Jalan
- c. Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
- d. Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat PKB
- e. Fasilitasi Pembangunan Bandara
- f. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara
- g. Penyusunan Tataran Transportasi Lokal
- h. Pembinaan awak angkutan

3. Program Peningkatan manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas

- a. Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
- b. Pemeliharaan Traffic light dan warning light
- c. Fasilitasi Forum LLAJ
- d. Pembinaan Perparkiran
- e. Pengadaan Perlengkapan Jalan
- f. Fasilitasi Tim Andalalin
- g. Pemeliharaan Rutin Lampu Penerangan Jalan (LPJU)
- h. Pemasangan LPJU Bobotsari – Karangreja
- i. Pemasangan LPJU Jompo = Purbalingga
- j. Pengadaan dan Pemasangan LPJU
- k. Pembangunan LPJU Tenaga Surya Kabupaten Purbalingga (Bangub)
- l. Pengadaan dan Pemasangan Jl. Kend. Soedirman Barat dan A. Yani LPJU

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018

Dalam rencana kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan telah ditetapkan sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Kelancaran Administrasi Perkantoran	• Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	%	100%
	- Persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu		100%
	- Persentase realisasi anggaran SKPD		100%
	• Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor		100%
	• Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor		100%
	• Terlaksananya diklat/bimtek pegawai		100%
• Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100%		
Terwujudnya sarana dan Prasarana Perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	• Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	%	70%

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Mendasarkan pada RENSTRA tahun 2016 - 2021 dan setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perhubungan selaku pengguna anggaran dengan Bupati Purbalingga selaku Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga

Tahun 2017 dan selanjutnya ditanda tangani bersama. Isi Perjanjian kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	%	65

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Rp. 1.289.340.000,00	
2.	Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 7.805.000.000,00	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 15.618.900.000,00	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas .

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga. Pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017 ada 4 (empat) aspek yang akan dibahas, yaitu :

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- > 101 = Amat Baik
- 80 - 100 = Baik
- 50 - 79 = Cukup
- < 49 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut aspek tersebut, adalah sebagai berikut :

A.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran Strategis

Hingga akhir tahun 2017 Dinas Perhubungan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu "Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", dengan sasaran strategisnya : Terwujudnya sarana prasarana Perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas.

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sasaran terwujudnya kelancaran adminitrasi perkantoran:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA KELANCARAN ADMINITRASI PERKANTORAN

Untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran tersebut tersaji dalam matrik dibawah ini, yaitu :

Tabel III.1 :

Sasaran terwujudnya kelancaran adminitrasi perkantoran

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (R/T)x100%
1. Kelancaran Administrasi perkantoran	Terlaksananya rapat koordinasi	775	775 kegiatan	100
	Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD	100%	100%	100
	persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat waktu	100 %	100%	100
	persentase realisasi anggaran SKPD	100 %	96,03%	96,03

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% (R/T)x100%
	Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor	90 pegawai dan masyarakat purbalingga	90 pegawai dan masyarakat purbalingga	100
	Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor	7 gedung, 6 kend. Dinas roda empat, 18 kend.dinas roda dua, komputer dan alat komunikasi (HT, Repeater)	9 gedung, 9 kend. Dinas roda empat, 19 kend.dinas roda dua, komputer dan alat komunikasi (HT, Repeater)	100
	Terlaksananya diklat/bimtek	15 pegawai	4 pegawai	26,7
	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	76,69%	100

secara umum capaian kinerja dapat dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada indikator terlaksananya diklat/ bimtek pegawai hanya bisa memberangkatkan diklat pegawai sebanyak 4 orang pegawai dari target jumlah pegawai yang dusulkan secara keseluruhan sebanyak 15 orang atau dari indicator ini hanya tercapai 26,7%. Dan realisasi capaian kinerja secara keseluruhan pada sasaran **Kelancaran Adminstrasi Perkantoran sebesar 90,34%.**, dan hal ini masuk dalam kategori "*baik*"

Sasaran ini tercapai melalui Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Bahan dan Jasa perkantoran
- b. Rapat – Rapat koordinasi dan konsultasi
- c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- d. Pengadaan Sarana dan prasarana kantor

- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai.
- f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja SKPD
- g. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Adapun pencapaian sasaran ini adalah melalui beberapa indikator kinerja, yaitu:

- 1) Terlaksananya rapat koordinasi
- 2) Terlaksananya sistem akuntabilitas SKPD
 - Persentase pelaksanaan kegiatan SKPD tepat Waktu
 - Persentase realisasi anggaran SKPD
- 3) Terpenuhinya kebutuhan sarana, bahan dan jasa kantor
- 4) Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor
- 5) Terlaksananya Diklat Pegawai
- 6) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

2. Sasaran Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Bermanfaat Untuk Keselamatan Berlalu Lintas

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

SASARAN 2 : TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN YANG BERMANFAAT UNTUK KESELAMATAN BERLALU LINTAS

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan yang bermanfaat untuk keselamatan berlalu lintas mendapatkan nilai rata-rata 93,6% dengan kategori cukup berhasil. Adapun hasil pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel III 2 :
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perhubungan Yang Bermanfaat Untuk Keselamatan Berlalu Lintas**

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2016	Target 2017	Capaian 2017	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
Persentase Sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai :	113	65	93,6	70

Adapun rata – rata capaian sarana prasarana perhubungan yang memadai diukur melalui :

Tabel III.3 :

Rata-rata Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Tahun 2017

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN YANG MEMADAI	KONDISI IDEAL (2016-2021)	TARGET 2017	REALISASI 2017	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	888.087	750	995	132.6
2	- Rambu Standar	1.000	50	100	200
3	- RPPJ	200	5	6	120
4	- Safety Mirror	50	0	0	0
5	- Guard Rail	3500	400	100	25
6	- Traffic Light	14	2	1	50
7	- Warning Light	50	2	4	200
8	- Road Barrier	200	10	0	0
9	- Traffic Cone	399	50	100	200
10	- Paku Marka	4000	250	325	130
11	- Halte	35	0	0	0
12	- LPJU	3600	500	797	159.4
13	- Terminal	10	0	0	0
				RATA – RATA	93.6%

Jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk 5 (lima) tahun kedepan, jalan di Kabupaten Purbalingga maka capaian yang telah diperoleh adalah sebagai berikut

**Tabel III.4 :
Capaian Sarana Prasarana Perhubungan Th. 2016 dan 2017:**

INDIKATOR KINERJA	SARPRAS PERHUBUNGAN	2016			2017		
		TARGET 2016	REALISASI	%	TARGET 2017	REALISASI	%
Persentase Sarana dan prasarana Perhubungan yang memadai	- Marka Jalan	200	2000	1000	750	995	132.6
	- Rambu-rambu	25	100	400	50	100	200
	- RPPJ	2	6	300	5	6	120
	- Safety Mirror	10	6	60	0	0	0
	- Guard Rail	200	480	240	400	100	25
	- Traffic Light	1	1	100	2	1	50
	- Warning Light	1	4	400	2	4	200
	- Road Barrier	20	45	225	10	0	0
	- Paku Marka	250	0	0	50	325	130
	- Traffic cone	25	0	0	250	100	200
	- Halte	6	6	100	0	0	0
	- LPJU	0	0	0	500	797	159.4
	- Terminal	0	0	0	0	0	0
		rata-rata			113		93.6

**Table.5
Capaian Kinerja Secara Keseluruhan sampai dengan tahun 2017**

NO	SARPRAS PERHUBUNGAN	KONDISI IDEAL (2016-2021)	REALISASI SAMPAI DENGAN 2017	PERSENTASE
1	- Marka Jalan	888.087	2995	0.34
2	- Rambu Standar	1000	200	20
3	- RPPJ	200	12	6
4	- Safety Mirror	50	6	12
5	- Guard Rail	3500	580	16.6
6	- Traffic Light	14	2	14.2
7	- Warning Light	50	8	16
8	- Road Barrier	200	45	22.5
9	- Traffic Cone	399	325	81.4
10	- Paku Marka	4000	100	2.5
11	- Halte	35	6	17.1
12	- LPJU	3600	797	22.1
13	- Terminal	10	0	0
				17.75%

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2017 sudah terpenuhi sebanyak 17,75% dari keseluruhan yang dibutuhkan

Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 adalah 93,6%, jika dibandingkan capaian pada tahun 2016 sebesar 113% dapat dikatakan bahwa pencapaian sasaran 2017 terjadi peningkatan dan masuk dalam kategori "baik".

Mengacu pada hasil pengukuran diatas terlihat bahwa, jumlah sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2017 baru tercapai 17,75% dari target yang telah ditetapkan selama 5 tahun. Perlu diketahui bahwa pemasangan fasilitas perlengkapan jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kepadatan lalu lintas, hal ini didasarkan pada hasil survey yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR).

Dengan sarana prasarana perhubungan yang memadai, pelayanan perhubungan akan semakin baik dan diharapkan tingkat kecelakaan lalu lintas bisa ditekan atau semakin sedikit dan pada saatnya bisa mencapai *zero accident*.

Guna mencapai Sasaran 2, sebagaimana diatas, didukung melalui 2 (dua) Program, yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan angkutan Lebaran
 - b. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
 - c. Fasilitasi Forum LLAJ
 - d. Pembinaan Perparkiran
 - e. Pengadaan Perlengkapan Jalan
 - f. Fasilitasi tim andalalin
 - g. Pemeliharaan Rutin LPJU
 - h. Pemasangan LPJU
2. Program Peningkatan Manajemen Angkutan, yang operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Kebersihan Terminal

- b. Pelaksanaan Operasi Laik Jalan
- c. Pengadaan Bahan Pengecatan PKB
- d. Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Uji PKB
- e. Fasilitasi Pembangunan Bandara
- f. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara
- g. Penyusunan Tataran Transportasi lokal
- h. Pembinaan Awak Angkutan Umum

Tingkat capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran tersebut diatas masuk dalam kategori "*baik*" atau rata-rata 91,95%, namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai kedua sasaran tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran pengusaha atau pemilik angkutan untuk memperbaharui kendaraan, sehingga banyak angkutan yang mangkrak/tidak beroperasi dan tidak memperpanjang ijin trayek;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, khususnya untuk PPNS LLAJ, staf teknis administrasi maupun teknis dibidang perhubungan yang menguasai tehnik APILL, LPJU dan tehnik bangunan (konstruksi)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk mengatasinya maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga mengambil langkah-langkah yang ditempuh, yaitu :

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai melalui usulan untuk mengikuti diklat baik teknis administrasi maupun teknis bidang perhubungan khususnya PPNS LLAJ dan Tehnis APILL dan LPJU
2. Membuat evaluasi terhadap standar operasional (SOP) dan Bersurat kepada para pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melakukan pembaharuan kendaraan dan perpanjangan ijin trayek atau memperbaharui ijin trayek.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Realisasi Anggaran

**Tabel III.5 :
Realisasi Anggaran**

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	810.941.000	760.421.604	93.77
	2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	157.250.000	154.937.917	98.53
	3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	344.180.000	315.087.076	91.55
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	491.975.000	450.114.400	91.49
	5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	69.880.000	68.000.000	97.31
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	55.000.000	35.475.000	64.5
	7	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	10.000.000	9.952.500	99.53
Peningkatan Pelayanan Angkutan	1	Pengelolaan Kebersihan Terminal	169.308.000	156.976.000	92.72
	2	Operasi Teknis Laik Jalan	24.000.000	22.246.000	92.69
	3	Pengadaan Bahan Pengecatan PKB	15.000.000	15.000.000	100.00
	4	Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat Kendaraan Bermotor	50.000.000	49.910.500	99.82
	5	Fasilitasi Pembangunan Bandara	100.000.000	92.618.553	92.62
	6	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara	14.969.900.000	14.886.766.200	99.44
	7	Penyusunan Tataran Transportasi Lokal	350.000.000	268.480.000	76.71
	8	Pembinaan Awak Angkutan	180.000.000	167.939.200	0.00
Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas	1	Pengamanan Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	250.000.000	249.908.643	99.96
	2	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light	150.000.000	149.732.000	99.82
	3	Fasilitasi Forum LLAJ	20.000.000	17.394.000	86.97
	4	Pembinaan Perpustakaan	120.000.000	120.000.000	100.00
	5	Pengadaan Perlengkapan Jalan	1.174.398.000	1.127.982.250	96.05
	6	Fasilitasi Tim Andalalin	10.000.000	3.164.000	31.64
	7	Pemeliharaan Rutin LPJU	1.160.370.000	1.139.559.845	98.21

PROGRAM		KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2		3	4	5	6
	8	Pemasangan LPJU Bobotsari – Karangreja	1.700.000.000	1.419.265.500	83.49
	9	Pemasangan LPJU Jompo – Purbalingga	1.000.000.000	831.375.250	83.14
	10	Pengadaan dan Pemasangan LPJU	1.175.000.000	1.168.612.500	99.46
	11	Pembangunan Lampu PJU Tenaga Surya Kab. Pbg (Ban Gub)	21.105.000.000	20.314.677.850	96.26
	12	Pengadaan dan Pemasangan LPJU Jl. Jend. Sudirman Barat dan A Yani	1.300.000.000	1.094.031.900	84.16

**Tabel III.6:
Analisis Efisiensi per Sasaran Tahun 2017**

SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
Terwujudnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	1.939.226.000	1.793.988.497	90,95	90,34	
Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang bermanfaat untuk Keselamatan Berlalu Lintas	45.022.976.000	43.295.640.000	85,66	93,6	Secara anggaran terdapat Efisiensi, hal ini diperoleh dari nilai Kontrak/ lelang. Tetapi dari nilai capaian kinerja dapat dikatakan blm memenuhi target, hal ini dikarenakan anggaran pengadaan sarpras perhubungan hanya cukup utk pengadaan sebagaimana tsb diatas. Dan kegiatan yang lain bersifat mendukung pelaksanaan tupoksi dinas perhubungan
Jumlah	46.962.202.000	45.089.628.688	96,01	91,95	

B.1. Pengelolaan Pendapatan Dinas Perhubungan

Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel III.7 :
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2017

	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1.	Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum.	1.571.685.000	1.616.027.000	102.82
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	700.000.000	628.034.660	89.72
3.	Retribusi Terminal :			
	a. Terminal Bukateja.	71.496.000	69.460.540	97.15
	b. Terminal Kejobong.	28.800.000	27.462.000	95.35
	c. Terminal Kutabawa.	8.000.000	4.000.500	50.01
	d. Terminal Kutasari	19.440.000	19.827.000	101.99
	e. Terminal Jompo	14.400.000	18.038.135	125.27
	f. Terminal Penaruban	5.544.000	6.044.000	109,02
4.	Retribusi Ijin Trayek.	160.000.000	118.155.000	73.85
		2.579.365.000	2.507.048.865	97.20

Lebih rinci mengenai realisasi PAD 2017 dapat dilihat pada lampiran.

Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **2.579.365.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.507.048.865,-** atau tercapai **97.20%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut tercapai kurang dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2.8%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya perolehan PAD dari retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi Ijin Trayek.

B.2. Permasalahan dan solusi dalam Perolehan PAD tahun 2017 :

1) Permasalahan

Peran pegawai Dinas Perhubungan dengan komitmen yang tinggi melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab,

meskipun target PAD 2017 belum bisa terpenuhi, dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui permasalahan/kendala, yaitu :

- a) Rendahnya masyarakat untuk memperpanjang trayek tepat waktu, hal ini dikarenakan potensi penumpang yang semakin sedikit/angkutan sepi dan mayoritas masyarakat beralih kepada moda transportasi roda dua dan atau kendaraan pribadi yang lain.
- b) Banyak kendaraan angkutan umum yang tidak beroperasi karena dianggap sudah tidak menguntungkan sehingga dihentikan.
- c) Dari 20 Angkutan perdesaan jurusan Banjarnegara – Kejobong yang masuk Terminal Kejobong hanya 2 angkutan dan hanya beroperasi pada hari pasaran saja sehingga tidak ada penarikan retribusi.
- d) Dari 33 angkutan perdesaan jurusan Bukateja – Kejobong yang beroperasi hanya 20 angkutan.
- e) Mikro bis jurusan Penaruban – Kejobong dari 17 unit kendaraan, yang beroperasi hanya 4 unit, hal ini dikarenakan sepi penumpang (banyak yang beralih moda transportasi)
- f) Terdapat beberapa jalur trayek yang kendaraannya tidak beroperasi maksimal sehingga tidak memperpanjang ijin seperti :
 1. Jalur H jurusan Kutasari-Walik-Kr Klesem-Purbayasa-Padamara dan 9 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 3 unit, tidak aktif 2, 4 unit dihentikan.
 2. Jalur J jurusan Bukateja – Kembangan –Tidu – Kemangkon - Panican-Kr.Kemiri – Senon – Palumutan – Bokol - Kedungbenda dari 17 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 6 unit, tidak aktif 4, 7 unit dihentikan.
 3. Jalur P Bobotasari – Selaganggeng – Serayu – Pratin - Kutabawa dari 18 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 5 unit, tidak aktif 11, 2 unit dihentikan.
 4. Jalur Q Bobotsari-Selaganggeng – Mrebet – Pagerandong - Pengalusan-Binangun – Cipaku - Karangangka dari 20 unit

kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 4 unit, tidak aktif 15, 1 unit dihentikan

5. Jalur V Pagutan – Metenggeng – Tobong – Kutasari – Karangreja -Kr.Klesem – Dawuhan – Bojanegara – Babakan - Kalikabong (pasar hewan), dari 22 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 11, 9 unit dihentikan
 6. Jalur X Kebogohan - Ps.Bojongsari dari 4 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 1 unit, tidak aktif 2, 1 unit dihentikan
 7. Jalur Y Terminal penaruban-sempor lor-brecek-kaligondang-cilapar-selanegara-selakambang-sidareja-pagerandong-sidanegara-arenan-slinga dari 5 unit kendaraan yang masih aktif ijinnya hanya 2 unit, tidak aktif 3 unit.
- g) PAD dari pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2017 tercapai 89,72%, hal ini dikarenakan terjadi penambahan target pada anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Kabupaten Purbalingga tidak terjadi kenaikan, yaitu tetap pada angka 8.315 unit
- h) PAD dari pelayanan di Terminal tercapai 98,07%, hal ini dikarenakan petugas pelayanan di terminal Kutabawa ditarik menjadi pegawai terminal Bobotsari yang sekarang telah beralih kepegawaiannya menjadi pegawai kementerian Perhubungan dan angkudes yang beroperasi sampai Kutabawa hanya 3 unit dari 8 unit yang memiliki ijin trayek.

2). Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas Dinas Perhubungan, mencoba mengatasinya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dilakukan pembinaan terhadap seluruh staf (staf meeting) setiap sebulan sekali guna meningkatkan loyalitas dan kinerja.

- b. Memberi masukan kepada pengambil kebijakan hendaknya dalam menetapkan target PAD dengan melihat potensi yang ada/senyatanya melalui kegiatan kajian/survey potensi PAD
- c. Dilaksanakannya operasi teknis laik jalan setiap bulan sekali, hal ini dimaksudkan disamping untuk meningkatkan keselamatan dan ketertiban para pengguna angkutan baik angkutan penumpang maupun barang juga dimaksudkan menjaring angkutan yang sudah tidak laik jalan supaya melakukan uji kir kendaraan agar kendaraan tersebut menjadi laik jalan dan yang telah habis masa ijin trayek supaya memperpanjang ijin trayek, sehingga dengan kegiatan ini bisa didapat banyak manfaat, yaitu menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kegiatan Uji Kir kendaraan bermotor dan Perpanjangan Ijin Trayek angkutan baik angkutan penumpang maupun barang.

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Tingkat Keberhasilan

Pada hakekatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun untuk menyajikan kinerja suatu Instansi Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang telah berjalan yaitu T.A. 2017 guna mengetahui tingkat capaian kinerja, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian apabila ditemukan ketidakberhasilan dapat diketahui faktor-faktor penyebabnya, sehingga di waktu yang akan datang akan lebih baik lagi.

1. Tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan Tahun 2017 :

1.1. Dari target PAD yang ditetapkan pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. **2.579.365.000,-** dapat terealisasi sebesar Rp. **2.507.048.865,-** atau tercapai **97.20%**. Dengan kata lain perolehan PAD tersebut masih terdapat kekurangan dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 2.8%, hal ini dikarenakan tidak tercapainya perolehan PAD dari retribusi terminal, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi Ijin Trayek.

1.2. Capaian Kinerja, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga menunjuk pada slaka **“baik” yaitu rata-rata 91,95%**, yaitu dengan penyerapan anggaran sebesar 96,03% dan Realisasi fisik kegiatan sebesar 100%.

Tingkat keberhasilan Dinas Perhubungan dibuktikan dengan telah terbayarnya 47 bidang pengadaan tanah seluas 4,2 Ha yang akan dipergunakan untuk perluasan bandara Jenderal Besar Soedirman, Hal ini ikut mendukung program Pemerintah Pusat dan Propinsi dalam merealisasikan terwujudnya bandar udara komersial di Jawa tengah bagian barat.

B. Permasalahan Yang dihadapi

Secara prinsip dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2017 Dinas Perhubungan tidak mengalami permasalahan yang

menonjol, hanya saja dalam pelaksanaan tugas sehari – hari yaitu pada kegiatan pemeliharaan LPJU sangat terhambat dalam melaksanakan pembetulan dikarenakan sarana truk sandelift yang ada kondisinya sudah sering rusak karena factor usia bahkan pada tahun 2017 sempat mangkrak selama 3 bulan dikarenakan kerusakan onderdil yang tidak tersedia di Purbalingga, perlu diketahui bahwa kendaraan operasional pemeliharaan LPJU hanya terdapat 2 unit truk dengan tenaga tehnis sebanyak 10 orang, sehingga sangat kekurangan untuk melakukan pemeliharaan LPJU se-Kabupaten Purbalingga.

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar hanya saja terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, yaitu Kegiatan Fasilitasi tim Andalalin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000,- realisasi anggaran Rp 3.164.000,- (31,64%) Realisasi Fisik berupa pemberian ijin andalalin sebanyak 3 pendirian bangunan, hal ini dikarenakan kurang tersosialisasinya peraturan tentang Andalalin.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2017 Dinas Perhubungan akan tetap mengupayakan agar lebih baik dengan meningkatkan kualitas manajemen kegiatan dan administrasi sehingga tidak akan ditemui lagi kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 semoga dapat bermanfaat, terima kasih

Purbalingga, April 2017

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

R. IMAM WAHYUDI, SH. MM.
Pembina Utama Muda
NIP.19630418 198903 1 006

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



R. IMAM WAHYUDI, SH. MM.

Pembina Utama Muda

NIP.19630418 198903 1 006